Katalog: 7102025.91

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI PAPUA BARAT

2017

https://papuabarat.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI PAPUA BARAT

2017

https://papuabarat.bps.go.id

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
PROVINSI PAPUA BARAT 2017

ISSN : 2654-8909

No. Publikasi : 91540.1801

Katalog : 7102025.91

Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 52 Halaman

Naskah :

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Papua Barat

Penyunting :

Bidang Statistik DIstribusi BPS Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

BPS Provinsi Papua Barat

Diterbitkan Oleh :

© BPS Provinsi Papua Barat

Dicetak oleh :

CV. Dharmaputra

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://papuabarat.bps.go.id

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI PAPUA BARAT

2017

Anggota Tim Penyusun :

Penanggung Jawab	**: Endang Retno Sri Subiyandani S.Si, M.M.**
Penyunting	**: Hendra Wijaya, S.ST, M.Si**
	A. Yoga Gumbira, S.ST
Penulis	**: Kristin Paskahrani Bakara, S.ST**
Pengolah Data/ Penyimpan Draft	**: Kristin Paskahrani Bakara, S.ST**
Infografis	**: Kristin Paskahrani Bakara, S.ST**

https://papuabarat.bps.go.id

https://papuabarat.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antarwilayah pada periode waktu tertentu. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2017 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2018. Maka, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat memandang perlu untuk menerbitkan Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat 2017 guna memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan serta pengguna data.

Publikasi ini merupakan terbitan kedua untuk tingkat provinsi Papua Barat. Dengan adanya publikasi ini diharapkan informasi di dalamnya dapat berguna, terutama bagi para pengambil keputusan, penyusun rencana dan evaluasi dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat.

BPS Provinsi Papua Barat tidak lupa memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta menyampaikan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak selama proses pengerjaan hingga publikasi ini dapat terbit. Kritik dan saran sangat diharapkan dari pengguna publikasi ini guna perbaikan pada terbitan selanjutnya.

https://papuabarat.bps.go.id

Manokwari, April 2018

BPS PROVINSI PAPUA BARAT

K e p a l a ,

Endang Retno Sri Subiyandani S.Si, M.M.

NIP. 19641023 198802 2 001

https://papuabarat.bps.go.id

DAFTAR ISI

KATALOG ii
TIM PENYUSUN iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 2
1.3. Ruang Lingkup 3
BAB II KONSEP DAN DEFINISI 4
BAB III METODOLOGI 6
3.1. Pemilihan Responden 6
3.2. Metode Pengumpulan Data 6
3.3. Metode Penghitungan IKK 7
3.4. Penghitungan Diagram Timbang IKK 9
3.4.1. *Basket of Construction Components Approach* (BOCC) 9
3.4.2. Sistem Konstruksi 12
3.4.3. Komponen Konstruksi 15
3.4.4. Prosedur Penghitungan Penimbang 16
INFOGRAFIS IKK PAPUA BARAT 2017 20
BAB IV PEMBAHASAN 21
4.1. Indeks Kemahalan Konstruksi Papua Barat 21
4.1. IKK Papua Barat berdasarkan kabupaten/kota 24
4.2.1. Kabupaten Fakfak 24
4.2.2. Kabupaten Kaimana 25
4.2.3. Kabupaten Teluk Wondama 25
4.2.4. Kabupaten Teluk Bintuni 26

http://papuabarat.bps.go.id

4.2.5. Kabupaten Manokwari 27
4.2.6. Kabupaten Sorong Selatan 28
4.2.7. Kabupaten Sorong 28
4.2.8. Kabupaten Raja Ampat 29
4.2.9. Kabupaten Tambrauw 30
4.2.10. Kabupaten Maybrat 30
4.2.11. Kabupaten Manokwari Selatan 31
4.2.12. Kabupaten Pegunungan Arfak 32
4.2.13. Kota Sorong 33
DAFTAR PUSTAKA 34
LAMPIRAN 35

https://papuabarat.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung 12
Tabel 2. Sistem Konstruksi untuk jenis bangunan lainnya 14
Tabel 3. IKK Tahun 2017 berdasarkan Provinsi 21
Tabel 4. IKK Provinsi Papua Barat dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 22
Tabel 5. IKK Kabupaten Fakfak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 24
Tabel 6. IKK Kabupaten Kaimana dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 25
Tabel 7. IKK Kabupaten Teluk Wondama dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 25
Tabel 8. IKK Kabupaten Teluk Bintuni dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 26
Tabel 9. IKK Kabupaten Mnokwari dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 27
Tabel 10. IKK Kabupaten Sorong Selatan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 28
Tabel 11. IKK Kabupaten Sorong dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 28
Tabel 12. IKK Kabupaten Raja Ampat dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 29
Tabel 13. IKK Kabupaten Tambrauw dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 30
Tabel 14. IKK Kabupaten Maybrat dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 30
Tabel 15. IKK Kabupaten Manokwari Selatan dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir 31
Tabel 16. IKK Kabupaten Pegunungan Arfak dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir 32
Tabel 17. IKK Kota Sorong dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 33

https://papuabarat.bps.go.id

https://papuabarat.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kategori Sektor Konstruksi 10
Gambar 2. Hubungan antara proyek, sistem dan komponen 15
Gambar 3. Contoh Pemberian Kode pada Dokumen BOQ 17
Gambar 4. Proses Penghitungan IKK 19
Gambar 5. IKK Provinsi Papua Barat Tahun 2017 24

https://papuabarat.bps.go.id

https://papuabarat.bps.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan fisik dan fasilitas/infrastruktur yang dilakukan di setiap daerah dengan harapan dapat mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung upaya pembangunan nasional tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Otonomi Daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, yang dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang diberlakukan di tiap daerah.

https://papuabarat.bps.go.id

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada daerah tersebut. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah serta adanya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah tersebut yang pada akhirnya dapat mengatasi permasalahan kesenjangan antar daerah. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat berjalan secara efektif, efisien, serta merata di seluruh daerah di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti dana perimbangan yang salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah.

Penghitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal, sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) per Daerah

AD = Alokasi DAU dari Alokasi Dasar

CF = Alokasi DAU dari Celah Fiskal

https://papuabarat.bps.go.id

Dimana Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sedangkan Celah Fiskal merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Selain Jumlah Penduduk, Luas Wilayah (meliputi luas wilayah daratan dan perairan), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu variabel penting dalam penghitungan Kebutuhan Fiskal yang pada akhirnya menjadi komponen penting dalam perumusan DAU.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Papua Barat 2017 antara lain:

1. Menyajikan data dasar bagi kebijakan dana perimbangan, khususnya DAU untuk Tahun Anggaran 2018.
2. Sebagai indikator keterbandingan tingkat kemahalan antar daerah.
3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan pembangunan infrastruktur di provinsi Papua Barat secara berkesinambungan.

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan Penyusunan IKK Provinsi Papua Barat Tahun 2017 ini mencakup seluruh kota/kabupaten se-Papua Barat, yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

https://papuabarat.bps.go.id

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan IKK antara lain adalah sebagai berikut:

❖ **Bahan bangunan/konstruksi** adalah material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunanan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

❖ **Produsen** adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin.

❖ **Pedagang grosir** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan secara grosir.

❖ **Pedagang campuran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan, dan rumah tangga baik secara grosir maupun eceran.

❖ **Pedagang eceran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada rumah tangga secara eceran.

❖ **Kegiatan Konstruksi** adalah suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset).

https://papuabarat.bps.go.id

Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi, dan bangunan jaringan komunikasi.

❖ **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki batas maksimal yaitu 8 tahun.

❖ **Paket Komoditas** adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena andil yang cukup besar dan data harganya lebih mudah dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota.

https://kalbar.bps.go.id

❖ **Diagram timbang (DT)** atau bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari DT kelompok jenis bangunan (3 kelompok) dan DT Umum. DT kelompok jenis bangunan digunakan untuk memperoleh nilai TKK masing-masing kelompok jenisbangunan. DT umum digunakan untuk menghitung IKK umum setelah diperoleh IKK masing-masing kelompok jenis bangunan.

❖ **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)** adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antarwilayah. Sesuai dengan pengertiannya IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode waktu tertentu.

BAB III
METODOLOGI

3.1. Pemilihan Responden

Responden Survei IKK terdiri dari: pedagang grosir yang menjual bahan bangunan dan jasa penyewaan alat berat. Data yang dikumpulkan dari pedagang grosir adalah: harga bahan bangunan, sedangkan yang diperoleh dari jasa penyewaan alat berat adalah data harga sewa alat berat dan upah jasa konstruksi. Pemilihan responden dilakukan secara purposif di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Khusus untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan yang diutamakan adalah pedagang grosir yang ada di wilayah bersangkutan. Jika tidak ada pedagang grosir, maka dipilih responden dengan skala prioritas yaitu: produsen, pedagang campuran (pedagang grosir sekaligus melayani eceran), baru kemudian pedagang eceran. Jumlah responden yang diambil untuk setiap kualitas barang terpilih adalah 3 (tiga).

https://papuabarat.bps.go.id

Lokasi responden Survei IKK harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden menggunkan kuesioner VIKK2017. Jika tidak memungkinkan dilakukan wawancara secara langsung, maka kuesioner bisa ditinggal untuk diisi sendiri oleh responden. Pencacahan dilakukan pada tanggal 20 s.d 30 pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan pada saat pencacahan

agar data yang dikumpulkan sesuai. Namun dalam penghitungan IKK Tahun 2017 data survei IKK yang digunakan adalah data bulan Juli 2016, Oktober 2016, Januari 2017, dan April 2017. Hal tersebut dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

3.3. Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK 2017 melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^{n} p_k . q_k$$

Dengan :

NK_j = Nilai Komponen ke-j

p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k

q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa alat ke-k

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

https://papuabarat.bps.go.id

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung PPP sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i . C_i + \beta_j . P_j + \varepsilon$$

Dengan:

NK_j= Nilai Komponen ke-j

C_i = dummy kabupaten/kota ke-i

P_j = dummy komponen ke-j dalam suatu system dan bangunan

α_i dan β_j = Koefisien regresi

$PPP\ (Purchasing\ Power\ Parity)_{Sistem_i}$ = exp(α_i)

Tahap Penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_i} = \left(\prod_{i=1}^{n} PPP_{Sistem_i} \right)^{w2_i}$$

Dengan:

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap Penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan rata-rata geometric dengan menggunakan rumus senagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{i=1}^{n} PPP_{Bangunan_i} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Dengan:

n = Jumlah sistem dalam suatu proyek

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^{n} \left(PPP_{Proyek_i} \right)^{w1_i} \right) . 100$$

Dengan:

n = Jumlah sistem dalam suatu kabupaten/kota

https://papuabarat.bps.go.id

3.4. Penghitungan Diagram Timbang IKK

3.4.1. *Basket of Construction Components Approach* (BOCC)

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC)[1]. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ).

https://kalbar.bps.go.id

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selajutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

[1] Pendekatan ini digunakan dalam International Comparation Programs (ICP) tahun 2005

Gambar 1. Kategori Sektor Konstruksi

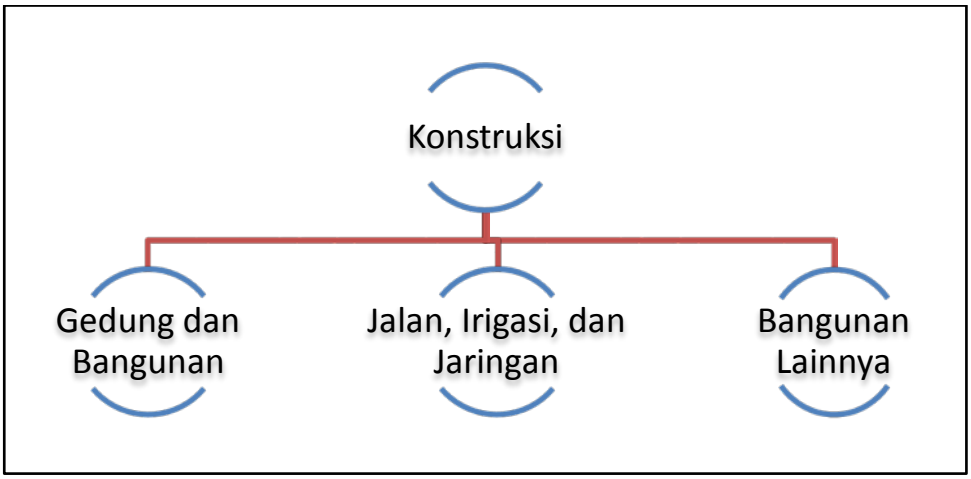

Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

https://pamubarat.bps.go.id

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
   - Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
   - Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
   - Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
   - Bangunan jalan dan jembatan kereta.

- Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.

3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
   - Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
   - Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
   - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
   - Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telefon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
   - Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
   - Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
   - Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
   - Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
   - Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi *prefab* dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi

https://sumbar.bps.go.id

bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

3.4.2. Sistem Konstruksi

Sistem menurut konsep pendekatan BOCC adalah suatu kumpulan komponen dalam suatu proyek konstruksi yang dapat menjalankan suatu fungsi tertentu. Sistem adalah struktur dalam sebuah bangunan yang diklasifikasikan kembali kedalam kumpulan komponen bertujuan untuk mendukung bangunan seperti pondasi, atap, eksterior dan interior, dan lainnya. Sistem konstruksi pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan lainnya. Berikut adalah jenis sistem untuk bangunan rumah dan gedung, dan sistem untuk klasifikasi jenis bangunan lainnya.

https://papuabarat.bps.go.id

a) Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Tabel 1. Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Nama Sistem	Penjelasan Sistem
***Site-work* (Persiapan)**	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
Substructure	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban bagian bangunan yang berada di atasnya seperti balok, atap dan lainnya.
Superstructure	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan

	tanah. Sistem ini menahan beban bagian bangunan di atasnya.
Exterior Shell/ Building Envelope	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang menyelimuti bangunan (atap). Bangunan ini memberi beban pada sistem *superstructure* pada bangunan.
Interior Partitions	Sistem yang terdiri dari semua dinding, dan bagian bangunan untuk jalan keluar masuk bangunan.
Interior and Exterior Finishes	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang bertujuan untuk memperindah bangunan, misalnya pengecatan.
Mechanical and Plumbing	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang mengatur suhu, saluran air, komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan lainnya.
Electrical	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang berhubungan dengan distribusi listrik dalam sebuah bangunan.

https://papuabarat.bps.go.id

b) Sistem konstruksi untuk jenis bangunan Jalan, Irigasi, Jaringan dan lainnya

Sistem konstruksi untuk jenis bangunan bangunan Jalan, Irigasi, Jaringan dan lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sistem Konstruksi untuk jenis bangunan lainnya

Nama Sistem	Penjelasan Sistem
***Site-work* (Persiapan)**	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
Substructure	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban dari struktur/bagian bangunan yang berada di atasnya.
Superstructure	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian bangunan di atasnya.
Mechanical Equipment	Perlengkapan mekanik yang dipasang pada suatu bangunan seperti pompa, turbin, pipa penghubung, tower pendingin, dan lainnya.
Electrical Equipment	Peralatan yang terpasang pada bangunan yang digunakan untuk sistem distribusi tenaga listrik, distribusi panel, pusat control pencahayaan, komunikasi dan lainnya.
Underground Utility	Jaringan bawah tanah, sistem atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, transmisi dan distribusi komunikasi atau telekomunikasi, listrik, gas, minyak bumi, saluran pembuangan akhir, dan lainnya. Peralatan ini termasuk pipa, kabel, *fiber optic cable*, dan lainnya yang terpasang dibawah permukaan tanah.

https://lpapupabanat.bps.go.id

3.4.3. Komponen Konstruksi

Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasikan secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan.

Gambar 2. Hubungan antara proyek, sistem dan komponen

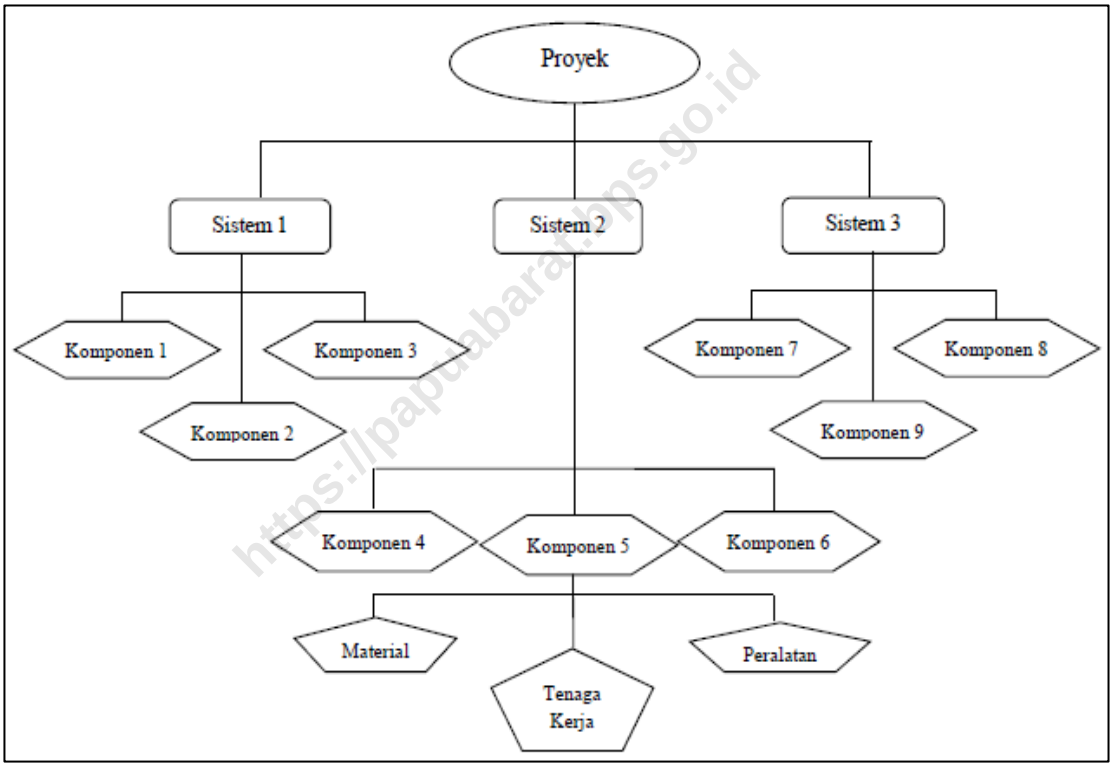

https://papuabarat.bps.go.id

Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item pekerjaan konstruksi yang

meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut.

Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal) dan bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, bangunan umum untuk jaringan air, listrik, dan komunikasi), bangunan 3 (bangunan lainnya).

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang. Macam-macam jenis penimbang tersebut adalah sebagai berikut:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

https://papuabarat.bps.go.id

3.4.4. Prosedur Penghitungan Penimbang

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. BoQ yang dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 di kabupaten/kota yang bersangkutan. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

a) Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan.
b) Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.
c) Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.

Setiap uraian pekerjaan BoQ terdapat volume, harga, dan nilai dari beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan.

https://papuabarat.bps.go.id

Gambar 3. Contoh Pemberian Kode pada Dokumen BOQ

Komponen		Nilai Proyek	Volume Pekerjaan	Jumlah Harga	Kode Sistem	Kode Barang	Analisis Harga				
							Nama Komoditi	Bobot komponen (Vo	Satuan	Harga	Nilai
III.	PEKERJAAN PASANGAN	-									0
1	Pas.Batu kosong	5,049,453.60	14.88	339,345.00	2	1302	Batu kali	1.2	m3	190,000	228,000
		-			2	[redacted]	Pasir urug	0.432	m3	130,000	56,160
		-			2	5600	Pekerja	0.78	oh	40,000	31,200
		-			2	5300	Tukang batu	0.39	oh	50,000	19,500
		-			2	5200	Kepala tukang batu	0.039	oh	55,000	2,145
		-			2	[redacted]	Mandor	0.039	OH	60,000	2,340
2	Pas.Batu kali 1 : 5 Ps Karung asem	23,424,094.45	39.53	592,565.00	3	1302	Batu kali	1.1	m3	190,000	209,000
		-			3	2000	Semen porland	136	kg	1,200	163,200
		-			3	1201	Pasir pasang ex karang asal	0.544	m3	210,000	114,240
		-			3	5600	Pekerja	1.5	oh	40,000	60,000
		-			3	5300	Tukang batu	0.75	oh	50,000	37,500
		-			3	5200	Kepala tukang batu	0.075	oh	55,000	4,125
		-			3	[redacted]	Mandor	0.075	oh	60,000	4,500

2. Menghitung masing-masing tahapan penimbang setiap kabupaten/kota

Penimbang untuk penghitungan IKK yang berasal dari data BoQ ada dua jenis penimbang yakni penimbang material dan penimbang sistem. **Penimbang material** digunakan untuk menghitung nilai komponen yaitu **volume** dari material,

sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi. Penimbang sistem digunakan untuk menghitung PPP bangunan yaitu ***share*** **nilai sistem** dari setiap sistem yang ada dalam suatu bangunan.

Selain dari data BoQ, penghitungan IKK 2017 juga menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009-2016. Penimbang realisasi APBD digunakan untuk tahap proyek.

Secara garis besar proses penghitungan IKK 2017 melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, dan diagram timbang material dari data BoQ.
2. Menghitung nilai komponen yakni rata-rata tertimbang aritmatika antara data harga hasil survei harga IKK (VIKK) dengan diagram timbang material.
3. Melakukan regresi CPD dari keseluruhan nilai komponen setiap proyek, bangunan, dan sistem untuk memperoleh PPP sistem.
4. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP sistem dengan penimbang sistem setiap proyek dan bangunan untuk memperoleh PPP bangunan.
5. Melakukan rata-rata geometrik dari PPP bangunan untuk memperoleh PPP Proyek.
6. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP Proyek dengan rata-rata data realisasi APBD tahun 2009-2016 untuk memperoleh angka IKK.

Proses penghitungan IKK 2017 secara keseluruhan beserta dengan penggunaan penimbang dapat dilihat di bagan di bawah ini.

https://papuabarat.bps.go.id

Gambar 4. Proses Penghitungan IKK

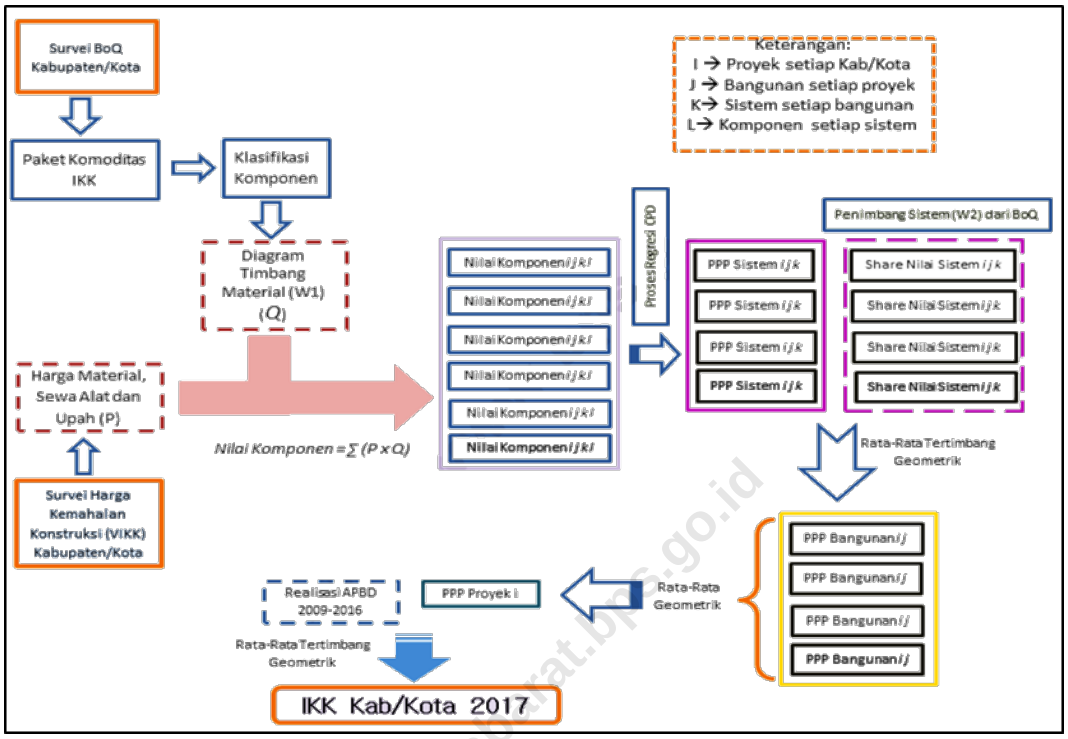

https://papuabarat.bps.go.id

IKK Papua Barat 2017

Kabupaten/Kota dengan IKK Terendah

118,56

Kota Sorong

118,76

Sorong

125,79

Sorong Selatan

213,02

Pegunungan Arfak

162,05

Tambrauw

147,63

Teluk Bintuni

Kabupaten/Kota dengan IKK Tertinggi

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Indeks Kemahalan Konstruksi Papua Barat

Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat Tahun 2017 adalah sebesar 140,04. Berikut tabel IKK berdasarkan provinsi Tahun 2017.

Tabel 3. IKK Tahun 2017 berdasarkan Provinsi

Kode	Provinsi	IKK	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
1100	Aceh	96.41	14
1200	Sumatera Utara	101.49	21
1300	Sumatera Barat	95.33	11
1400	Riau	94.73	10
1500	Jambi	88.39	2
1600	Sumatera Selatan	98.64	19
1700	Bengkulu	93.27	9
1800	Lampung	90.09	4
1900	Kep. Bangka Belitung	101.71	23
2100	Kepulauan Riau	122.72	32
3100	DKI Jakarta	117.57	28
3200	Jawa Barat	96.78	15
3300	Jawa Tengah	93.05	8
3400	DI Yogyakarta	92.52	6
3500	Jawa Timur	97.5	17
3600	Banten	97.88	18
5100	Bali	111.64	26
5200	Nusa Tenggara Barat	91.63	5
5300	Nusa Tenggara Timur	95.94	13
6100	Kalimantan Barat	109.12	24

https://papuabarat.bps.go.id

Kode	Provinsi	IKK	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
6200	Kalimantan Tengah	97.47	16
6300	Kalimantan Selatan	101.67	22
6400	Kalimantan Timur	109.21	25
6500	Kalimantan Utara	118.27	29
7100	Sulawesi Utara	112.05	27
7200	Sulawesi Tengah	88.13	1
7300	Sulawesi Selatan	95.57	12
7400	Sulawesi Tenggara	99.75	20
7500	Gorontalo	92.76	7
7600	Sulawesi Barat	88.61	3
8100	Maluku	121.06	31
8200	Maluku Utara	120.92	30
9100	Papua Barat	140.04	33
9400	Papua	229.82	34

https://papuabarat.bps.go.id

Dapat kita lihat bahwa di antara 34 provinsi di Indonesia, Papua Barat menempati peringkat kedua IKK tertinggi. Dimana provinsi yang menempati peringkat pertama IKK tertinggi adalah Provinsi Papua dengan IKK sebesar 229,82 dan peringkat ketiga tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara dengan IKK sebesar 120,92. Sementara itu, tiga provinsi dengan IKK terendah yaitu provinsi Sulawesi Tengah dengan IKK sebesar 88,13; Jambi dengan IKK sebesar 88,39; dan Sulawesi Barat dengan IKK sebesar 88,61. Kota yang menjadi acuan (IKK=100) pada IKK tahun 2017 ini berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu kota Surabaya.

Tabel 4. IKK Provinsi Papua Barat dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

PROPINSI	IKK 2013*	IKK 2014	IKK 2015	IKK 2016	IKK 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PAPUA BARAT	121.01	125.79	146.01	146.46	140,04

Keterangan: * penghitungan IKK belum mengikutsertakan kabupaten pemekaran baru yaitu kabupaten Manokwari Selatan dan kabupaten Pegunungan Arfak.

IKK provinsi Papua Barat pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya. IKK menunjukkan perbandingan tingkat kemahalan antar wilayah, IKK di Provinsi Papua Barat lebih tinggi dari 32 provinsi lain selain provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa harga bahan-bahan dan jasa konstruksi di Papua Barat pada umumnya lebih mahal dibandingkan dengan provinsi lain selain provinsi Papua.

Mahalnya harga barang dan jasa konstruksi dipengaruhi banyak hal, antara lain kondisi geografis seperti kondisi jalan yang mempengaruhi jalur dan arus distribusi, sarana dan akses transportasi dari dan ke kabupaten/kota tersebut, jarak daerah dengan tempat asal barang, jumlah pedagang besar didaerah tersebut dan lain-lain. Pada umumnya kemahalan di Provinsi Papua Barat terjadi karena bahan-bahan konstruksi di Provinsi Papua Barat, khususnya bahan konstruksi hasil pabrik, harus didatangkan dari luar. Jarak kabupaten/kota di Papua Barat yang jauh dari daerah asal barang, memberi peranan penting pada mahalnya biaya transportasi dan biaya pengiriman barang-barang yang didatangkan dari luar provinsi tersebut, sehingga pada akhirnya menyebabkan harga jual barang-barang di dalam provinsi tersebut menjadi lebih mahal.

Dari tiga belas kabupaten/kota di provinsi Papua Barat, tiga kabupaten/kota yang memiliki IKK tertinggi pada tahun 2017 adalah kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 213,02; kabupaten Tambrauw sebesar 162,05; dan kabupaten Teluk Bintuni sebesar 147,63. Sedangkan tiga kabupaten/kota yang memiliki IKK terendah yaitu kota Sorong sebesar 118,56; kabupaten Sorong sebesar 118,76; dan kabupaten Sorong Selatan sebesar 125,79.

https://papuabarat.bps.go.id

Gambar 5. IKK Provinsi Papua Barat Tahun 2017

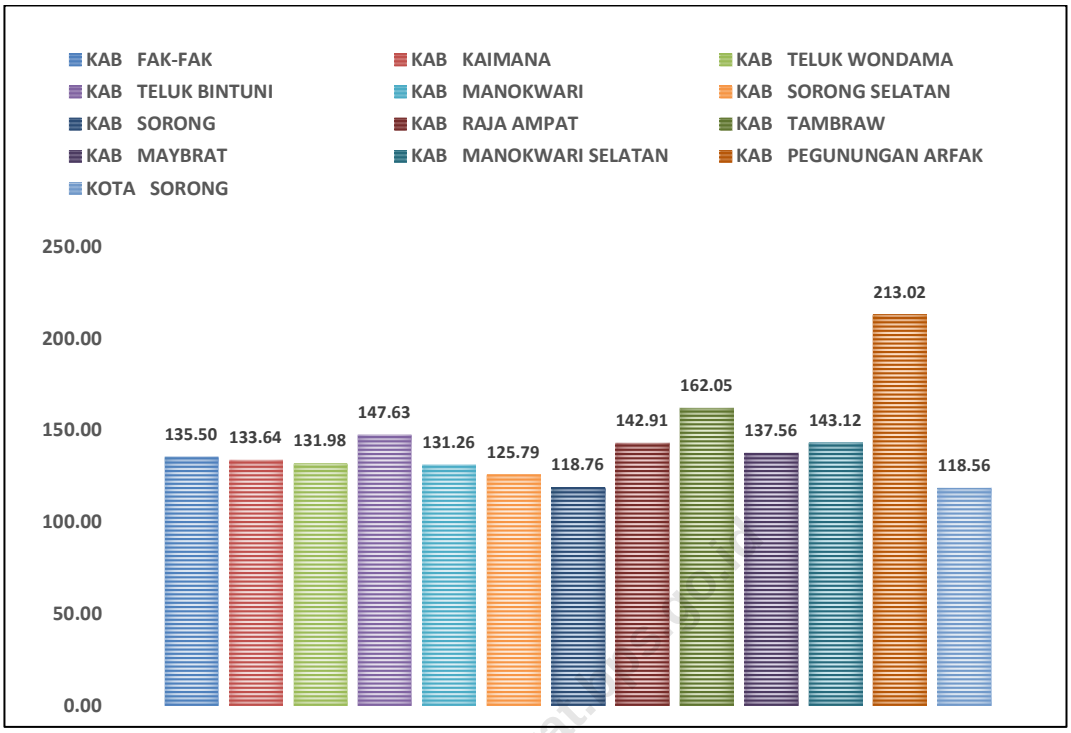

4.1. IKK Papua Barat berdasarkan kabupaten/kota

4.2.1. Kabupaten Fakfak

Tabel 5. IKK Kabupaten Fakfak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9101	KAB. FAK-FAK	172,4	8	175,77	10	155,99	10	144,09	10	135,50	7

IKK kabupaten Fakfak pada tahun 2017 adalah sebesar 133,50 dan menempati peringkat 7. IKK kabupaten Fakfak tahun 2017 lebih rendah dari IKK tahun 2016 yang mencapai 144,09 dan menempati peringkat 10.

Kabupaten Fakfak memiliki infrastruktur pelabuhan dan bandara yang dapat menjadi jalur masuk arus barang ke kabupaten ini. Akan tetapi untuk arus barang

https://papuabarat.bps.go.id

dalam jumlah besar, pada umumnya melalui jalur laut karena dapat memuat barang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan melalui jalur udara. Arus barang dari kabupaten Fak-fak bervariasi, tetapi pada umumnya barang-barang didatangkan langsung dari luar provinsi.

4.2.2. Kabupaten Kaimana

Tabel 6. IKK Kabupaten Kaimana dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9102	KAB. KAIMANA	147,79	7	151,52	8	131,72	8	131,29	5	133,64	6

IKK kabupaten Kaimana pada tahun 2017 adalah sebesar 133,64 dan berada di posisi peringkat 6. IKK kabupaten Kaimana tahun 2017 lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 131,29 dan menempati peringkat 5.

Sama halnya dengan kabupaten Fakfak, kabupaten Kaimana memilki sarana pelabuhan dan bandara yang menjadi jalur masuk arus barang ke kabupaten Kaimana. Arus barang dalam jumlah besar umumnya melalui jalur laut karena dapat memuat barang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan melalui jalur udara. Barang-barang yang masuk ke kabupaten Kaimana pada umumnya didatangkan dari luar provinsi.

4.2.3. Kabupaten Teluk Wondama

Tabel 7. IKK Kabupaten Teluk Wondama dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9103	KAB. TELUK WONDAMA	118,18	4	118,88	4	123,84	5	133,24	6	131,98	5

https://papuabarat.bps.go.id

IKK kabupaten Teluk Wondama tahun 2017 adalah sebesar 131,98 dan menempati peringkat 5. IKK kabupaten Teluk Wondama tahun 2017 lebih rendah dari IKK tahun sebelumnya sebesar 133,24 yang menempati peringkat 6.

Kabupaten Teluk wondama memiliki sarana pelabuhan yang menjadi jalur utama arus masuk barang. Sedangkan untuk sarana bandara sempat tidak beroperasi dikarenakan tidak terdapat penerbangan dari dan ke kabupaten Teluk Wondama, dan baru beroperasi kembali pada pertengahan tahun 2017. Selain itu bandara kabupaten Teluk Wondama masih belum cukup memadai dan hanya mampu mengakomodasi pesawat kecil seperti *Suzy Air*. Jalur arus barang yang masuk ke kabupaten Teluk Wondama bervariasi, ada yang didatangkan langsung dari luar provinsi dan ada yang didatangkan dari kabupaten sekitar yang dekat.

https://papuabarat.bps.go.id

4.2.4. Kabupaten Teluk Bintuni

Tabel 8. IKK Kabupaten Teluk Bintuni dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9104	KAB. TELUK BINTUNI	143,74	6	147,42	7	128,17	6	138,91	9	147,63	11

IKK kabupaten Teluk Bintuni tahun 2017 adalah sebesar 147,63 dengan peringkat 11 dan termasuk dalam 3 kabupaten dengan IKK tertinggi di Papua Barat. IKK kabupaten Teluk Bintuni tahun 2017 ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang menempati peringkat 9 dengan IKK sebesar 138,91.

Kabupaten Teluk Bintuni memiliki sarana pelabuhan dan bandara. Akan tetapi, bandara kabupaten Teluk Bintuni masih belum cukup memadai dan hanya mampu mengakomodasi pesawat kecil seperti *Suzy Air.* Arus barang yang masuk ke kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya melalui jalur laut. Sedangkan jalur

darat umumnya digunakan untuk arus barang dari kabupaten terdekat seperti Manokwari, dikarenakan jalur udara yang masih kurang memadai. Jalur arus barang yang masuk ke kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya didatangkan dari luar provinsi dan ada beberapa juga yang didatangkan dari kabupaten sekitar yang dekat.

4.2.5. Kabupaten Manokwari

Tabel 9. IKK Kabupaten Mnokwari dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9105	KAB. MANOKWARI	117,42	3	116,6	3	116,71	3	123,66	4	131,26	4

https://papuabarat.bps.go.id

IKK kabupaten Manokwari tahun 2017 adalah sebesar 131,26 dan menempati peringkat 4. IKK Kabupaten Manokwari tahun 2017 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 123,66 tetapi tetap berada di peringkat yang sama.

Kabupaten Manokwari merupakan ibukota provinsi Papua Barat. Kabupaten Manokwari memiliki sarana pelabuhan dan bandara yang mendukung pergerakan arus barang yang masuk ke kabupaten ini. Pelabuhan yang memadai memudahkan pedagang untuk mendatangkan barang-barang dalam jumlah besar melalui jalur laut. Arus barang di kabupaten Manokwari lancar dengan didukung sarana transportasi yang cukup memadai tersebut. Barang- barang yang masuk ke kabupaten Manokwari pada umumnya didatangkan langsung dari luar provinsi.

4.2.6. Kabupaten Sorong Selatan

Tabel 10. IKK Kabupaten Sorong Selatan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9106	KAB. SORONG SELATAN	129,61	5	126,09	5	120,9	4	121,55	3	125,79	3

Kabupaten Sorong Selatan termasuk dalam tiga (tiga) kabupaten/kota dengan IKK terendah se-Papua Barat tahun 2017. IKK kabupaten Sorong Selatan tahun 2017 adalah sebesar 125,79 dan menempati peringkat 3. IKK kabupaten Sorong Selatan tahun 2017 lebih tinggi dari IKK tahun 2016 sebesar 121,55 tetapi tetap berada di peringkat yang sama.

Kabupaten Sorong Selatan memiliki sarana bandara, akan tapi bandara tersebut masih belum cukup memadai untuk mengakomodasi pesawat maskapai-maskapai besar dan hanya mampu mengakomodasi pesawat kecil seperti *Susi Air.* Sehingga jalur transportasi utama kabupaten Sorong Selatan adalah jalur darat. Semakin lancarnya transportasi darat dari kota Sorong menuju ke kabupaten Sorong Selatan mendukung pergerakan arus barang ke kabupaten tersebut. Arus masuk barang ke kabupaten Sorong pada umumnya berasal dari kota Sorong.

https://papuabarat.bps.go.id

4.2.7. Kabupaten Sorong

Tabel 11. IKK Kabupaten Sorong dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9107	KAB. SORONG	110,34	1	115,63	2	113,83	2	119,68	2	118,76	2

Kabupaten Sorong juga merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam 3 kabupaten/kota dengan IKK terendah se-Papua Barat tahun 2017. IKK Kabupaten Sorong pada tahun 2017 yaitu sebesar 118,76. Selama 3 (tiga) tahun terakhir Kabupaten Sorong menempati peringkat 2 dengan IKK terendah di Papua Barat.

Jarak kabupaten Sorong yang dekat dengan kota Sorong mempermudah arus masuk barang di kabupaten Sorong. Pada umumnya barang-barang di kabupaten Sorong diambil dari kota Sorong dan juga ada yang didatangkan langsung dari luar dengan jalur pengiriman melalui pelabuhan kota Sorong. Mudahnya akses transportasi menekan biaya transportasi sehingga harga barang-barang di kabupaten Sorong cenderung mendekati harga di kota Sorong.

https://papuabarat.bps.go.id

4.2.8. Kabupaten Raja Ampat

Tabel 12. IKK Kabupaten Raja Ampat dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9108	KAB. RAJA AMPAT	173,13	9	169,66	9	150,35	9	138,52	8	142,91	9

IKK Kabupaten Raja Ampat tahun 2017 adalah sebesar 142,91 dan menempati peringkat 9. IKK Kabupaten Raja Ampat tahun 2017 lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 138,52 dan menempati peringkat 8.

Kabupaten Raja Ampat memiliki sarana pelabuhan yang menjadi sarana utama untuk akses dari dan ke luar kabupaten Raja Ampat. Untuk mencapai Kabupaten Raja Ampat lebih mudah melalui kota Sorong dengan jalur laut. Terdapat beberapa komoditas di Kabupaten Raja Ampat yang didatangkan dari luar provinsi melalui jalur laut. Akan tetapi pada umumnya barang-barang di kabupaten tersebut didatangkan dari kota Sorong melalui jalur laut.

4.2.9. Kabupaten Tambrauw

Tabel 13. IKK Kabupaten Tambrauw dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9109	KAB. TAMBRAW	206,04	11	198,63	12	189,1	12	175,04	12	162,05	12

Pada tahun 2017, kabupaten Tambrauw merupakan Kabupaten dengan IKK tertinggi kedua setelah Kabupaten Pegunungan Arfak, dengan IKK sebesar 162,05. Selama 5 tahun terakhir Kabupaten Tambrauw termasuk dalam 3 kabupaten dengan IKK tertinggi di Papua Barat.

Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat. Sebelumnya, kabupaten Tambrauw merupakan bagian dari kabupaten Sorong. Kondisi geografis yaitu jarak yang jauh, yang menyebabkan mahalnya biaya transportasi dan akhirnya berdampak pada tingginya harga barang-barang termasuk bahan-bahan konstruksi. Arus masuk barang ke kabupaten Tambrauw pada umumnya berasal langsung dari kota Sorong, terutama untuk barang-barang konstruksi hasil pabrik.

https://papuabarat.bps.go.id

4.2.10. Kabupaten Maybrat

Tabel 14. IKK Kabupaten Maybrat dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9110	KAB. MAYBRAT	177,68	10	178,33	11	158,8	11	146,60	11	137,56	8

IKK Kabupaten Maybrat pada tahun 2017 yaitu sebesar 137,56 dan menempati peringkat 8. IKK Kabupaten Maybrat tahun 2017 lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 146,60 dan menempati peringkat 11.

Kabupaten Maybrat juga merupakan salah satu kabupaten pemekaran, yang sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Sorong Selatan. Tingginya harga barang di Maybrat dipengaruhi oleh jarak yang jauh, sehingga berdampak pada tingginya biaya transportasi menuju kabupaten tersebut. Arus masuk barang dari kabupaten Maybrat pada umumnya diambil langsung dari kota Sorong, dan beberapa juga diambil dari kabupaten terdekat yaitu kabupaten Sorong Selatan.

4.2.11. Kabupaten Manokwari Selatan

Tabel 15. IKK Kabupaten Manokwari Selatan dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9111	KAB. MANOKWARI SELATAN	-	-	138,21	6	131,58	7	134,53	7	143,12	10

https://papuabarat.bps.go.id

IKK kabupaten Manokwari Selatan tahun 2017 adalah sebesar 143,12 dengan peringkat 10. IKK kabupaten Manokwari Selatan tahun 2017 lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 134,53 dengan peringkat 7.

Kabupaten Manokwari Selatan juga merupakan kabupaten pemekaran yang sebelumnya menjadi bagian dari kabupaten Manokwari. Bila dibandingkan dengan kabupaten Pegunungan Arfak yang juga merupakan pemekaran dari kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan lebih dekat ke kabupaten Manokwari sehingga arua distribusi barang lebih mudah dibandingkan kabupaten Pegunungan Arfak. Pembangunan sarana jalan untuk jalur transportasi dari kabupaten Manokwari menuju ke Manokwari terus mengalami peningkatan, sehingga mempermudah arus barang dari ke kabupaten Manokwari Selatan. Pada umumnya barang-barang di kabupaten Manokwari Selatan diambil dari kabupaten Manokwari.

4.2.12. Kabupaten Pegunungan Arfak

Tabel 16. IKK Kabupaten Pegunungan Arfak dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9112	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	-	-	199,63	13	189,75	13	203,96	13	213,02	13

Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan salah satu kabupaten pemekaran baru yang sebelumnya menjadi bagian dari kabupaten Manokwari. Selama 4 tahun terakhir kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten yang memiliki IKK tertinggi se-Papua Barat. IKK Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2017 sebesar 213,02, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 203,96.

Akses transportasi menuju kabupaten Pegunungan Arfak saat ini hanya melalui jalur darat dari kabupaten Manokwari. Kondisi geografis yaitu jarak yang jauh dengan kondisi jalan yang masih kurang baik, serta akses transportasi menuju kabupaten tersebut yang masih cukup sulit menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi sehingga berdampak pada mahalnya barang-barang di kabupaten Pegunungan Arfak tersebut. Selain itu, belum ada transportasi reguler dengan jadwal yang pasti dari kabupaten Manokwari menuju Kabupaten Pegunungan Arfak sehingga untuk menuju kabupaten tersebut harus menyewa kendaraan. Hal ini menyebabkan biaya transportasi menjadi mahal. Arus masuk barang pada umumnya berasal dari kabupaten Manokwari. Oleh karena itu harga barang-barang di kabupaten tersebut menjadi mahal.

https://papuabarat.bps.go.id

4.2.13. Kota Sorong

Tabel 17. IKK Kota Sorong dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK 2013	Rank	IKK 2014	Rank	IKK 2015	Rank	IKK 2016	Rank	IKK 2017	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9171	KOTA SORONG	113,64	2	113,99	1	108,86	1	109,21	1	118,56	1

Kota Sorong merupakan satu-satunya daerah administratif kota di provinsi Papua Barat. Diantara 13 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Papua Barat, Kota Sorong merupakan daerah yang paling berkembang dan padat dengan aktivitas ekonomi. Selama 3 tahun terakhir kota Sorong merupakan kota dengan IKK terendah di Provinsi Papua Barat. IKK Kota Sorong pada tahun 2017 yaitu sebesar 118,56, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 109,21.

Kota Sorong memiliki akses transportasi yang mudah dan bervariasi, mulai dari angkutan darat, laut maupun udara. Kota Sorong memiliki bandara yang memadai dengan jadwal penerbangan setiap hari sehingga memperlancar arus barang yang didatangkan melalui jalur udara. Selain itu kota Sorong juga memiliki pelabuhan yang menjadi pintu masuk arus barang yang berasal dari luar provinsi Papua Barat ke dalam provinsi Papua Barat melalui jalur laut.

Mudahnya akses transportasi di kota Sorong memperlancar pergerakan arus barang yang masuk dan keluar dari kota Sorong. Di kota Sorong terdapat distributor yang mendatangkan langsung barang-barang dari produsen di daerah asal barang sehingga toko-toko bangunan di kota Sorong dapat mengambil langsung barang melalui distributor tersebut tanpa harus mendatangkan sendiri barang-barang tersebut. Hal ini juga mempengaruhi kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang pada umumnya mendatangkan barang melalui kota Sorong.

https://papuabarat.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2017. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2017.

Badan Pusat Statistik. 2014. Pedoman Pencacahan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2014.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

https://papuabarat.bps.go.id

LAMPIRAN

https://papuabarat.bps.go.id

https://papuabarat.bps.go.id

VIKK2017

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI SEWA ALAT BERAT DAN UPAH JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK

PERIODE : JANUARI 2017

https://sulbar.bps.go.id

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan *item* yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
2. Responden adalah **pedagang grosir/distributor** yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
3. Responden harus berada di **ibukota** kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari **kualitas yang setara**.
5. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode **harus sama**. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang **setara**.
6. Isian kuesioner dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri dari BPS RI. Hasil entri dikirim ke shpb@bps.go.id dengan cc ke BPS Provinsi masing-masing.
7. Dilarang mengubah format *file* program data entri yang dikirim oleh SHPB.
8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa, disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT		
1. Provinsi		
2. Kabupaten / Kota		

BLOK II : KETERANGAN PENCACAH DAN PENGAWAS			
1. Nama Pencacah		6. Nama Pengawas	
2. NIP Pencacah		7. NIP Pengawas	
3. Tanggal Pencacahan	4. Selesai Dientri Tanggal	8. Tanggal Pengawasan	
5. Tanda Tangan Pencacah		9. Tanda Tangan Pengawas	

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tanah Urug	Biasa	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
Pasir	Pasir Pasang (pasir laut, pasir kali)	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
	Pasir Beton / Cor (pasir gunung)	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
Batu Pondasi	Batu Kali Utuh	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
	Batu Kali Belah	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
	Batu Gunung	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
Batu Bata	Batu bata tanah liat (bata merah)	I			buah									
		II			buah									
		III			buah									
Batako	Batako berlubang (hollow block)	I			buah									
		II			buah									
		III			buah									
	Batako tidak berlubang (solid block)	I			buah									
		II			buah									
		III			buah									

https://papuabarat.bps.go.id

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bata Ringan	Cellcon atau Hebel	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
Batu Split	Ukuran 1 - 2 cm	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
	Ukuran 2 - 3 cm	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
	Ukuran 3 - 4 cm	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
Seng Gelombang	Ukuran (0,02 x 90 x 180) cm	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
	Ukuran (0,03 x 90 x 180) cm	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
Paku	Paku Kayu 2"- 6"	I	kg											
		II	kg											
		III	kg											
	Paku Beton	I	kg											
		II	kg											
		III	kg											
	Paku Seng	I	kg											
		II	kg											
		III	kg											

https://papuabarat.bps.go.id

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Paku	Paku Triplek	I	kg											
		II	kg											
		III	kg											
Semen Portland 1.TIGA RODA 2.TONASA 3.GRESIK 4.PADANG 5.HOLCIM	Portland Composite Cement(PCC) (SNI 15-7064-2004)	I			zak									
		II			zak									
		III			zak									
	Portland Pozzoland Cement (PPC) (SNI 15-0302-2004)	I			zak									
		II			zak									
		III			zak									
Besi Beton (Full) SNI 07-2052-2002	Besi beton polos (BJTP 24) ukuran d=6mm , p=12m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	Besi beton polos (BJTP 24) ukuran d=8mm , p=12m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	Besi beton polos (BJTP 24) ukuran d=10mm , p=12m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	Besi beton ulir (BJTS 32) ukuran d=10mm , p= 12m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	Besi beton ulir (BJTS 32) ukuran d=16mm , p=12m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
Bak Mandi Fiber 1.WALRUS 2.MASPION 3.WARREN 4.TECHPLAST 5.KING	Ukuran 55 x 55 x 60 cm	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											

https://papuabarat.bps.go.id

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bak Mandi Fiber 1.WALRUS 2.MASPION 3.WARREN 4.TECHPLAST 5.KING	Ukuran 60 x 60 x 60 cm	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Ukuran	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
Kloset 1.TOTO 2.AMERICA 3.INA 4.DUTY 5.CHAMPION	Kloset duduk standar (lengkap dengan tabung)	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Kloset jongkok	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
Seng Plat	Seng plat BJLS 20 L=45	I	m											
		II	m											
		III	m											
	Seng plat BJLS 20 L=60	I	m											
		II	m											
		III	m											
Pipa PVC 1.WAVIN 2.MASPION 3.VINILON 4.WINLON 5.TRILLIUN	AW Φ 1/2" panjang 4 m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	AW Φ 3/4" panjang 4 m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	AW Φ 1" panjang 4 m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											

https://kebijakan.pu.go.id

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pipa PVC 1.WAVIN 2.MASPION 3.VINILON 4.WINLON 5.TRILLIUN	AW Φ 4" panjang 4 m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	D Φ 3" panjang 4 m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	D Φ 4" panjang 4 m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
Kayu Balok	Kayu kelas I	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
	Kayu kelas II	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
	Kayu kelas III	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
Kayu Papan	Kayu kelas I	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
	Kayu kelas II	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											
	Kayu kelas III	I	m^3											
		II	m^3											
		III	m^3											

https://papuabarat.bps.go.id

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kayu Lapis/Triplek	Triplek 3mm	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
	Triplek 4mm	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
	Triplek 6mm	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
	Triplek/ Plywood 9mm	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
	Triplek/ Plywood 12mm	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
Cat Emulsi 1.CATYLAC 2.AVITEX 3.VINILEX 4.NIPPON PAINT 5.METROLITE	Cat Tembok eksterior	I	25 kg											
		II	25 kg											
		III	25 kg											
	Cat Tembok Interior	I	25 kg											
		II	25 kg											
		III	25 kg											
	Cat Genteng	I	20 kg											
		II	20 kg											
		III	20 kg											
Cat Minyak 1.AVIAN 2.ALTEX 3.YOKO 4.EMCO 5.KUDA TERBANG	Cat Besi/Kayu	I	kg											
		II	kg											
		III	kg											

repository.unpas.ac.id

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cat Minyak 1.AVIAN 2.ALTEX 3.YOKO 4.EMCO 5.KUDA TERBANG	Cat Meni Besi/Kayu	I	kg											
		II	kg											
		III	kg											
Tegel/Keramik 1. MULIA 2.ARWANA 3.ASIATILE 4.IKAD 5.PLATINUM	Keramik uk. 30x30 cm	I	m^2											
		II	m^2											
		III	m^2											
	Keramik uk. 40x40cm	I	m^2											
		II	m^2											
		III	m^2											
	Keramik uk. 30x30 cm warna/motif	I	m^2											
		II	m^2											
		III	m^2											
	Keramik uk. 40x40 cm warna/motif	I	m^2											
		II	m^2											
		III	m^2											
Genteng/Atap	Genteng tanah liat tradisional (tidak berglasur)	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Genteng tanah liat keramik	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
Merk atap metal: 1. Sakura roof 2. Multi roof 3. Surya roof 4. Soka roof	Atap metal	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
	Atap asbes	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											

Hak cipta dilindungi undang-undang

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kaca 1.ASAHI 2.MULIA 3.TENSINDO 4.TOSSA	Kaca polos bening 3 mm	I			lembar									
		II			lembar									
		III			lembar									
	Kaca polos bening 5 mm	I			lembar									
		II			lembar									
		III			lembar									
	Kaca riben 5 mm	I			lembar									
		II			lembar									
		III			lembar									
Aspal	Curah Grade 60/70 Lokal	I	ton											
		II	ton											
		III	ton											
	Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal	I	drum											
		II	drum											
		III	drum											
	Curah Grade 60/70 Impor	I	ton											
		II	ton											
		III	ton											
	Drum Grade 60/70 (155 kg) Impor	I	drum											
		II	drum											
		III	drum											
Gypsum 1.JAYABOARD 2.ELEPHANT 3.KNAUF 4.A PLUS	Gypsum plafon 9 mm	I			lembar									
		II			lembar									
		III			lembar									
	Gypsum list polos 220 cm X 11cm X 3cm	I	Batang											
		II	Batang											
		III	Batang											

https://lpjp.pu.go.id

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabel 1.ETERNA 2.VISICOM 3.PRABA 4.FOCUS 5.EXTRANA	Kabel NYA ukuran 1 x 1,5 mm^2	I	m											
		II	m											
		III	m											
	Kabel NYA ukuran 1 x 2,5 mm^2	I	m											
		II	m											
		III	m											
	Kabel NYM ukuran 3 x 2,5 mm^2	I	m											
		II	m											
		III	m											
	Kabel NYM ukuran 3 x 4 mm^2	I	m											
		II	m											
		III	m											
Bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II	Daun pintu (2m x 1m x4cm)	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Daun Jendela (dengan kaca, ukuran 50cm x 120cm)	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Kusen pintu (2m x 1m)	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Kusen jendela (50cm x 120cm)	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
Mesin Pompa Air 1.SHIMIZU 2.SANYO 3.PANASONIC 4.NASIONAL 5.DAB	Pompa Shallow Pump (kedalaman s.d 7m)	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											

https://jdih.pu.go.id

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Mesin Pompa Air 1.SHIMIZU 2.SANYO 3.PANASONIC 4.NASIONAL 5.DAB	Pompa Semi Jet Pump (kedalaman 8-12m)	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Pompa Jet Pump (kedalaman 13-20m)	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
Rangka Atap Baja	Profil Canal "C" tipe C71.075	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	Profil Canal "C" tipe C81.075	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	Profil "Omega" / reng tipe AA	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	Profil "Omega" / reng tipe A	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
Aluminium	Profil kusen aluminium 3 inchi	I	m											
		II	m											
		III	m											
	Profil kusen aluminium 4 inchi	I	m											
		II	m											
		III	m											
	Aluminium lembaran 0,5 mm panjang 2 m, lebar 1 m	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											

http://repository.ub.ac.id

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat				Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aluminium	Aluminium lembaran 1 mm panjang 2 m, lebar 1 m	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
Tangki Air Fiber 1.PENGUIN 2.PROFILE 3.EXCEL 4.PENYU 5.GRAND	Ukuran 350- 450 liter	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Ukuran 500-650 liter	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Ukuran 1000-1100 liter	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Ukuran 2000-2200 liter	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
Lampu 1.PHILLIPS 2.HANNOCS 3.CHIYODA 4.OSRAM 5.SHINYOKU	Lampu pijar 25 W	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Lampu pijar 40 W	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Lampu TL panjang 18-20 W	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Lampu SL (TL pendek) 18 W	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											

Pusat Penelitian dan Pengembangan PU

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol,dll)	Ukuran Satuan setempat: Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)	Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lampu 1.PHILLIPS 2.HANNOCS 3.CHIYODA 4.OSRAM 5.SHINYOKU	Lampu SL (TL pendek) 20 W	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
MCB (SPLN 108-1993) 1.SCHNEIDER 2.MERLIN GERIN 3.BROCO 4.SHUKAKU 5.HANNOCS	1 phasa 4 Ampere	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	1 phasa 6 Ampere	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	1 phasa 10 Ampere	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											

PENJELASAN PENGISIAN BLOK III

TANAH URUG, PASIR, BATU PONDASI, BATU SPLIT

Satuan standar untuk barang-barang ini adalah m3. Jika harga yang diperoleh sudah dalam m3 maka isi kolom 7,8,9 dengan angka 1 dan isikan harga per m3 pada kolom 12. Jika satuan pencacahan tidak standar (truk,pick up) maka isikan panjang, lebar, dan tinggi bak yang terisi kemudian harga yang dicacah per satuan tsb pada kolom 12.

BATU BATA, BATAKO

Isikan ukuran batu bata/batako per buah yaitu: panjang, lebar, dan tinggi dalam meter kemudian tulis harga batu bata per buah pada kolom 12.

SEMEN PORTLAND, CAT EMULSI

Pilih ketiga barang ini berdasarkan peringkat merek. Isikan merek pada kolom 5, berat per kemasan di kolom 10, dan harga per kemasan pada kolom 12.

BESI BETON, PIPA PVC

Untuk PIPA PVC utamakan mencacah sesuai dengan peringkat merek. Isikan panjang PIPA PVC atau BESI BETON pada kolom 7 kemudian harga per batangnya pada kolom 12.

KAYU BALOK, KAYU PAPAN

Tuliskan jenis kayu pada kolom 5. Satuan standar kayu balok atau kayu papan adalah m3. Jika pencacahan barang tsb sudah dalam satuan m3 maka isikan kolom 7,8,9 dengan angka 1 kemudian isikan harga per m3 pada kolom 12. Jika kayu per lembar maka isikan panjang, lebar, dan tinggi kayu pada kolom 7-9. isikan harga kayu per lembar pada kolom 12. Jika kayu per ton maka isikan kolom 11 dengan angka konversi dari ton ke m3 (1ton=…m3), sedangkan kolom 7-9 dikosongkan. Harga yang dicatat pada kolom 12 adalah harga kayu per ton..

KACA, GYPSUM

Utamakan mencacah sesuai dengan peringkat merek. Tuliskan merek pada kolom 5 kemudian isikan panjang dan lebar kaca/gypsum plafon per lembar (dalam meter) pada kolom 7,8. Tuliskan harga kaca/gypsum plafon per lembar pada kolom 12.

KABEL

Satuan standar kabel adalah meter. Jika kabel dijual per meter maka isikan kolom 7 dengan angka 1 dan tuliskan harga kabel per meter pada kolom 12. Jika kabel dijual per rol maka isikan panjangnya pada kolom 7 kemudian tuliskan harga kabel per rol pada kolom 12.

PENEGASAN PENCACAHAN IKK

1. PENCACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL (PASIR, BATU PONDASI, BATU SPLIT, BATU BATA, BATAKO, KUSEN) DIPERBOLEHKAN DARI PRODUSEN YANG TIDAK BERADA DI IBUKOTA KABUPATEN/KOTA.

2. PENCACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL TIDAK HARUS *READY STOCK*.

3. UNTUK PENCACAHAN IKK TRIWULAN III TAHUN 2015 DAN TRIWULAN BERIKUTNYA, PEMILIHAN KULITAS/SPESIFIKASI BARANG HARUS SAMA.

4. UNTUK SEWA ALAT BERAT PADA BLOK 4, DI KOLOM KETERANGAN TULISKAN APAKAH HARGA SEWA MERUPAKAN HASIL KONVERSI ATAU TIDAK.

BLOK IV. DATA SEWA ALAT BERAT DAN UPAH PEKERJA KONSTRUKSI

Responden: Jasa Penyewaan Alat Berat (umur alat berat maksimal 8 tahun, tanpa operator dan bahan bakar)

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai sewa per satuan/unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Excavator PC-200	Kapasitas bucket 0,8 m^3	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas bucket 0,6 m^3	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas bucket 0,4 m^3	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Buldozer D-65	Universal Blade (U-Blade)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Straight Blade (S-Blade)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Bowl Dozer	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Loader (Wheel atau Track)	Kapasitas bucket 0,8 m^3	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			

https://kalbar.bps.go.id

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai sewa per satuan/unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Loader (Wheel atau Track)	Kapasitas bucket 0,6 m^3	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas bucket 0,4 m^3	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Tandem/Vibrating Roller	8 - 10 ton	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	kurang dari 8 ton	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Dump Truck	Kapasitas 20 ton (tronton)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas 12 ton (engkel)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas 8 ton (colt diesel)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Motor Grader	≤ 100 HP	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	> 100 HP	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			

https://kalbar.bps.go.id

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai sewa per satuan/unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Asphalt Finisher		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Generator set	60 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	40 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	20 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
JASA KONSTRUKSI						
Upah Kepala Tukang		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Tukang Batu		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Tukang Kayu		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Instalatir Listrik		I	Titik		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Pembantu Tukang		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				

https://kepulauanbangkabelitung.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://papuabarat.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT
Jln. Trikora Sowi IV - Manokwari - Papua Barat - 98315
Telp. 0986.214199 Fax. 0986.214199
Email: bps9100@bps.go.id
Homepage: htpp://papuabarat.bps.go.id

9 772654 890009